

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory)**

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa dimana pihak *principal* mendelegasikan wewenang dalam membuat keputusan kepada *agent* tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2005). Sedangkan Menurut Jensen dan Meckling (1976), Agency Theory (teori agensi) menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak *principal* dan pihak *agent*, dimana Investor merupakan pihak *principal* sedangkan pihak manajemen pengelola perusahaan merupakan pihak *agent*. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu berhak atas kepentingan mereka sendiri sehingga ada perbedaan kepentingan antara *principal* (investor) dan *agent* (manager). *Principal* cenderung menginginkan pengembalian sebesar mungkin dan secepatnya atas investasi yang telah ditanamkan seperti kenaikan porsi dividen dari saham yang dimiliki akan tetapi *agent* menginginkan untuk memperoleh kompensasi yang besar atas kinerjanya.

Dengan adanya dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana masing-masing pihak akan berusaha untuk memperoleh kemakmuran yang diinginkan, maka dapat terjadi konflik kepentingan melalui adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham dimana manajer lebih mengetahui mengenai informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang dibanding pemegang saham. Karena ada asimetri informasi dan konflik kepentingan dapat menyebabkan manajer untuk menyajikan informasi yang tidak benar kepada pemilik, terutama bila informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja

manajer. Salah satu penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham yaitu mengenai keputusan terkait aktivitas pencarian dana dan bagaimana dana yang diperoleh akan dimanfaatkan.

Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003), untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik ( *Good Corporate Governance* )

### **2.1.2. Good Corporate Governance**

Setiap perusahaan pastinya ingin memiliki tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mencapai tujuan dan dapat terus bertahan. Tata kelola perusahaan yang baik dikenal dengan *Good Corporate Governance* dimana menurut Sulistyanto (2008) *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder-nya. Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam situs resminya menyebutkan bahwa secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).

Dalam tata kelola perusahaan yang baik perlu memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dimana Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menyatakan agar dapat mencapai hal tersebut diperlukan asas *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

#### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Dalam menyediakan informasi, perusahaan harus memastikan bahwa tidak adanya informasi yang disembunyikan untuk pemegang saham tertentu karena ada kepentingan pribadi

pihak lain, meski demikian tetap harus memperhatikan peraturan yang berlaku karena terdapat informasi yang tidak dapat diberikan untuk umum yang diatur oleh Undang-Undang mengenai keterbukaan informasi. Laporan atau informasi terkait perusahaan harus diterbitkan secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan jenis laporannya seperti laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Asas ini mengharuskan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan dimana perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder*. Untuk menerapkan asas *Accountability* dapat dilakukan hal seperti pembentukan audit internal dan menunjuk auditor eksternal, memberlakukan etika bisnis dan melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Terkait dengan transparansi informasi, perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk menginformasikan bagaimana kinerja perusahaan selama satu periode tertentu dan tanggungjawab lainnya agar dapat mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

## 4. Independensi (*Independency*)

Pengelolaan perusahaan harus independen sehingga tidak ada bagian tertentu di perusahaan yang mendominasi dan tidak adanya intervensi dari pihak lain serta tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dengan tujuan pengambilan keputusan yang objektif.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam asas ini perusahaan harus memastikan pemenuhan hak semua pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh informasi secara akurat dan tepat waktu dimana semua pemegang saham memperoleh informasi yang sama.

Menurut Boediono (2005) mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah agensi. Mekanisme yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional.

### **2.1.3. Dewan Komisaris**

Menurut Forum Corporate Governance (FCGI) dimana dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Dewan komisaris adalah wakil para pemegang saham dalam entitas bisnis yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki tugas melakukan pengawasan, memberikan nasihat atau arahan kepada dewan Direksi terkait perencanaan, pengelolaan, serta pelaksanaan bisnis dan isu-isu perusahaan dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan (Dewi et al., 2018)

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) berikut adalah tugas-tugas utama Dewan komisaris

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, menetapkan sasaran kerja, anggaran tahunan dan rencana usaha, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan mengadakan perubahan jika diperlukan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sehingga dewan komisaris diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada seluruh pemegang saham melalui RUPS.

#### **2.1.4. Komite Audit**

Menurut Kep.29/PM/2004, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit juga dianggap sebagai penghubung antara pihak pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam mengatasi masalah terkait pengendalian perusahaan. Menurut Hanggeraeni (2015:81) Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang diperlukan. Komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi dan memeriksa laporan keuangan, pengendalian

internal, dan proses audit. Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dalam hal ini meliputi serta menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal perusahaan, menelaah sistem pelaporan eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ Nomor SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Ada beberapa manfaat dalam pembentukan komite audit dalam perusahaan, diantaranya:

1. Komite audit melakukan pengawasan laporan keuangan dan pelaksanaan audit internal.
2. Komite audit melakukan pengawasan independen terhadap pengelolaan perusahaan.
3. Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan yang baik dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi manajemen laba

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.29/PM/2004 dimana mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

#### **2.1.5. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusi adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi lain yang biasanya diukur dalam persentase jumlah kepemilikan institusional terhadap keseluruhan jumlah saham yang beredar. Menurut Tarjo (2008). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi manajemen perusahaan (*agent*) dimana dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi tindakan manajer untuk melakukan manajemen laba demi kepentingan pihak tertentu. Hal tersebut dapat terjadi karena institusi pada umumnya akan memantau perusahaan yang diinvestasikan mengenai kinerja dan perkembangannya, dan hal inilah yang dapat menekan adanya manipulasi laba atau kecurangan lain yang dapat dilakukan oleh manajemen. Menurut Boediono (2005) perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen dimana semakin besar kepemilikan institusional

maka akan semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Milik Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

### **2.1.6. Leverage**

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya atau dalam mengembangkan usahanya terkadang mengalami kekurangan dana dan salah satu sumber dana yang dapat diterima yaitu melalui hutang. Rasio *leverage* pada umumnya merupakan pengukuran kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hanafi (2005) menjelaskan bahwa *leverage* keuangan bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Sedangkan apabila menurut Sugiono dan Untung (2008) *leverage* adalah rasio perbandingan antar total utang dengan total aktiva dimana semakin besar hutang perusahaan dibandingkan dengan aktivanya, maka semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan untuk membayar kewajibannya.

Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan hutang dimana semakin tinggi rasio *leverage* maka risiko yang dihadapi semakin besar. Dengan kata lain, dengan adanya *leverage* dapat meningkatkan laba perusahaan jika digunakan dengan tepat, akan tetapi jika tidak sesuai yang direncanakan maka dapat mengalami kerugian yang sama dengan persentase laba yang diharapkan, atau mungkin lebih besar (Van Horne, 2007). Dalam konteks bisnis, *leverage* dibagi menjadi dua macam yaitu :



### 1. *Operating Leverage*

*Operating leverage* atau *leverage* operasional merupakan ukuran risiko operasi yang dinilai dari biaya tetap untuk biaya operasi dan dapat dilihat pada laporan laba rugi (Moeljadi, 2006). Menurut Rodoni dan Ali (2010) *operating leverage* adalah kondisi dimana penggunaan aktiva harus menutup biaya tetap dimana biaya tetap adalah biaya operasi tetap seperti sewa gedung, gaji, biaya penyusutan, dan lain lain.

### 2. *Financial Leverage*

*Financial leverage* atau *leverage* keuangan merupakan ukuran risiko keuangan yang diukur dari biaya tetap dari hutang yang digunakan dimana *financial leverage* yang tinggi akan menyebabkan risiko finansial. Rodoni dan Ali (2010) menyatakan *financial leverage* adalah penggunaan modal pinjaman disamping modal sendiri sehingga perusahaan harus membayar beban tetap yaitu bunga.

Dengan adanya pilihan bantuan dana melalui hutang, maka *leverage* dapat mempengaruhi perubahan terhadap laba operasional yang dihasilkan sehingga diduga berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan rasio *Debt to Equity* (DER). Menurut Kasmir (2016) *Debt to Equity Ratio* adalah merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini dapat menggambarkan perbandingan total hutang dengan total modal perusahaan sehingga dapat mengetahui berapa modal yang dapat dijadikan untuk jaminan hutang. Menurut Fahmi (2017) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio Debt Equity Ratio karena hutang berhubungan dengan modal dimana salah satu modal usaha dapat berasal dari hutang. Jadi dengan melihat seberapa perbandingan hutang dan modal dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan dan kemampuan membayar hutangnya.

#### **2.1.6.1. Tujuan Leverage**

Menurut Kasmir (2016) menjelaskan tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor.
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki.

#### **2.6.1.2. Manfaat leverage**

Menurut Kasmir (2016) manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage* yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

### **2.1.7. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah tolak ukur yang biasanya digunakan oleh investor untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan dalam menentukan keputusan investasinya. Sartono (2010) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva serta modal sendiri. Sedangkan menurut Harahap (2009) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan alat ukur untuk menilai perusahaan dimana semakin tinggi keuntungan yang diperoleh maka semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Kasmir (2016) tujuan dari rasio profitabilitas yaitu :

1. Untuk menghitung atau mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

3. Untuk menilai bagaimana perkembangan laba dari periode ke periode
4. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman

Rasio profitabilitas terbagi menjadi beberapa jenis, Hery (2016) mengklasifikasikan rasio-rasio profitabilitas sebagai berikut:

1. *Return on Assets (ROA)*

*Return on Assets* atau hasil pengembalian asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset dimana semakin tinggi hasilnya maka semakin baik karena semakin mampu perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah yang tertanam dalam total asset.

2. *Return on Equity (ROE)*

*Return on Equity* atau hasil pengembalian merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri dimana semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

3. *Gross Profit Margin*

*Gross Profit Margin* atau margin laba kotor merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Semakin tinggi margin laba kotor berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan, dimana rasio ini lebih tinggi lebih baik dan sebaliknya.

4. *Operating Profit Margin*

*Operating Profit Margin* atau margin laba operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio dapat dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Semakin tinggi margin laba operasional berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional dimana hal ini baik dan sebaliknya.

5. *Net Profit Margin*

*Net Profit Margin* atau margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurang antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba

sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

Dalam penelitian ini, Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai pengukuran untuk rasio profitabilitas karena menurut Hanafi (2005) rasio *Return on Assets* (ROA) ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Menurut Sutrisno (2012) ROA dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Aktiva}}$$

## **2.1.8. Manajemen Laba**

### **2.1.8.1. Pengertian Manajemen Laba**

Manajemen laba dapat diartikan sebagai campur tangan manajer dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba dengan tujuan tertentu selama dalam batasan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Manajemen laba merupakan sebuah tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan (Guna dan Herawaty, 2010). Sedangkan menurut Azlina (2010) manajemen laba adalah menentukan laba sedemikian rupa dengan mempermainkan pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi baik melalui pemilihan alternative metode maupun melalui operasi. Manajemen laba muncul sebagai dampak dari kebebasan manajer untuk memilih dan menggunakan metode akuntansi tertentu saat merekam dan mengatur informasi pada laporan keuangan (Mappanyukki et al, 2016).

Sugiri (1998) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Definisi Sempit

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan bagaimana perusahaan memilih metode Akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk “bermain” dengan komponen pendapatan akrual (*discretionary accruals*) dalam menentukan besarnya laba.

2. Definisi Luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer dalam meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

### **2.1.8.2. Bentuk-Bentuk Manajemen Laba**

Menurut Scott (2003) bentuk-bentuk pengaturan laba yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. *Taking bath*

*Taking bath* atau disebut dengan *big baths* dilakukan dengan cara mengakui biaya biaya periode mendatang pada periode sekarang. Hal ini dilakukan ketika ada tekanan dari organisasi atau reorganisasi (seperti penggantian direksi) dan kondisi yang tidak menguntungkan tanpa bias dihindari. Dengan dilakukannya hal ini, laba pada periode yang mendatang akan menjadi lebih tinggi.

2. *Income Minimization*

*Income Minimization* yaitu memperkecil laba dengan tujuan untuk meminimumkan pajak. Kebijakan ini dapat berupa penghapusan atas aktiva tak berwujud ,barang barang modal, dan pembebanan pengeluaran.

### 3. *Income Maximization*

*Income Maximization* yaitu memperbesar laba dengan tujuan untuk memperoleh bonus atau seolah olah mencapai target sehingga seolah olah perusahaan memperoleh laba besar. Tindakan ini juga bisa dilakukan dengan tujuan menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

### 4. *Income Smoothing*

Pada umumnya perusahaan lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang cenderung stabil daripada perubahan laba yang drastis sehingga dilakukan manajemen perkembangan laba yang dilaporkan stabil.

### 5. *Timing Revenue dan Expenses Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan cara membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan waktu atas suatu transaksi seperti pengakuan lebih awal terhadap pendapatan maupun beban.

## **2.1.8.3. Motivasi Manajemen Laba**

Watts dan Zimmerman (1986) dalam buku Sri Sulistyanto (2008 : 44-46) menyatakan ada beberapa motivasi yang mendorong pihak manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu sebagai berikut :

### 1. *Bonus Plan Hypothesis*

*Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa manajer yang bekerja dengan adanya perjanjian bonus tertentu akan mengatur laba yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan tersebut agar bonus yang diterima maksimal dan dapat memperoleh bonus juga di masa yang akan datang.



2. *Debt (Equity) Hypothesis*

*Debt (Equity) hypothesis* menyatakan ketika perusahaan mempunyai rasio *Debt to Equity* atau rasio utang dan ekuitasnya besar, maka cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang menghasilkan laporan laba yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan manajer dengan tujuan agar kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya terlihat lebih baik.

3. *Political Cost Hypothesis*

*Political cost hypothesis* dilakukan dengan tujuan menghindari atau melanggar regulasi pemerintah dimana regulasi pemerintah terkait bidang usaha seperti perpajakan, monopoli, *anti-trust* dan lain lain. Tindakan ini dilakukan dengan cara menggunakan metode akuntansi yang dapat memperkecil laba sehingga pajak yang harus dibayarkan juga lebih kecil.

#### **2.1.8.4. Pengukuran Manajemen Laba**

Dalam penelitian ini pengukuran manajemen laba menggunakan variabel *discretionary accruals* dengan *Modified Jones Model* karena model ini dianggap lebih baik diantar model lain untuk mengukur manajemen laba (Dechow,1995) . Konsep *discretionary accruals* memberi pengertian bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan . *Discretionary accruals* menggunakan komponen akrual dalam mengatur laba karena komponen akrual tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga dalam mempermainkan komponen akrual tidak disertai kas yang diterima/dikeluarkan (Sulistyanto, 2008). Sulistyanto (2008) juga menyatakan bahwa *discretionary accrual* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan serta keleluasaan dalam mengestimasi dan memakai standar

akuntansi dimana manajemen menggunakan celah standar akuntansi yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan justifikasi terkait dengan kebebasan menentukan estimasi umur waktu aset tetap, kebebasan menentukan metode depresiasi aset tetap, menentukan presentase jumlah piutang tak tertagih, dan menentukan metode penentuan jumlah persediaan. Tomas J Sibarani et al (2015) menyatakan bahwa *discretionary accruals* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba serta memiliki hubungan yang positif antara *discretionary accruals* dengan manajemen laba yang artinya semakin besar *discretionary accruals* maka semakin besar peluang manajemen perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Menurut Othman et al. (2006) tanda positif dan negatif pada hasil *discretionary accruals* menentukan kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba. Apabila *discretionary accruals* menunjukkan nilai positif maka terdapat kenaikan manipulasi laba. Sebaliknya jika nilai *discretionary accruals* menunjukkan nilai negatif maka menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada manipulasi laba

Perhitungan *discretionary accruals* dengan *Modified Jones Model* (1995) yaitu sebagai berikut :

a. Mencari nilai *total accrual* :

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

$TAC_{it}$  = total accrual perusahaan i pada periode t

$NI_{it}$  = Net income (Laba bersih) perusahaan i pada periode t

$CFO_{it}$  = Cash Flow from Operations ( arus kas operasi) perusahaan i pada periode t

b. Mencari nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

$TA_{it}$  = Total akrual perusahaan i pada periode t

$A_{it-1}$  = Total aktiva perusahaan i pada periode t-1

$\Delta REV_{it}$  = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t

$PPE_{it}$  = Aktiva tetap perusahaan pada periode t

$\beta$  = Nilai koefisien

c. Menghitung discretionary accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

$NDA_{it}$  = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t

$A_{it-1}$  = Total aktiva perusahaan i pada periode t-1

$\Delta REV_{it}$  = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t

$\Delta REC_{it}$  = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t

$PPE_{it}$  = Aktiva tetap perusahaan pada periode t

$\beta$  = Nilai koefisien

d. Menghitung discretionary accrual (DA) adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

$DA_{it}$  = Discretionary accruals perusahaan i pada periode t

$TA_{it} / A_{it-1}$  = Total akrual perusahaan i pada periode t

$NDA_{it}$  = Non discretionary accruals perusahaan i pada periode t

## 2.2. Kajian Empiris

**Tabel 2.1.**

### **Kajian Empiris Penelitian Terdahulu**

No .	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel / Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Najmi Yatul Husna (2015)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Umur dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba / Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
2.	Taufik Hidayat (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan <i>Leverage</i>	Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran	Variabel Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Berpengaruh signifikan terhadap

		Terhadap <i>Earnings Management</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2015)	Perusahaan, <i>Leverage, Earnings Management</i> /Analisis Regresi Linear Berganda	<i>Earnings Management</i> sedangkan variabel Komisaris Independen tidak Berpengaruh signifikan terhadap <i>Earnings Management</i>
3.	Normalita Tungga Widita (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Free Cash Flow</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, <i>Free Cash Flow</i> , Manajemen Laba / Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, <i>Free cash flow</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan variabel Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
4.	Khuriyati (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> ,	Komposisi Komisaris Independen,	Variabel Komposisi Komisaris Independen,

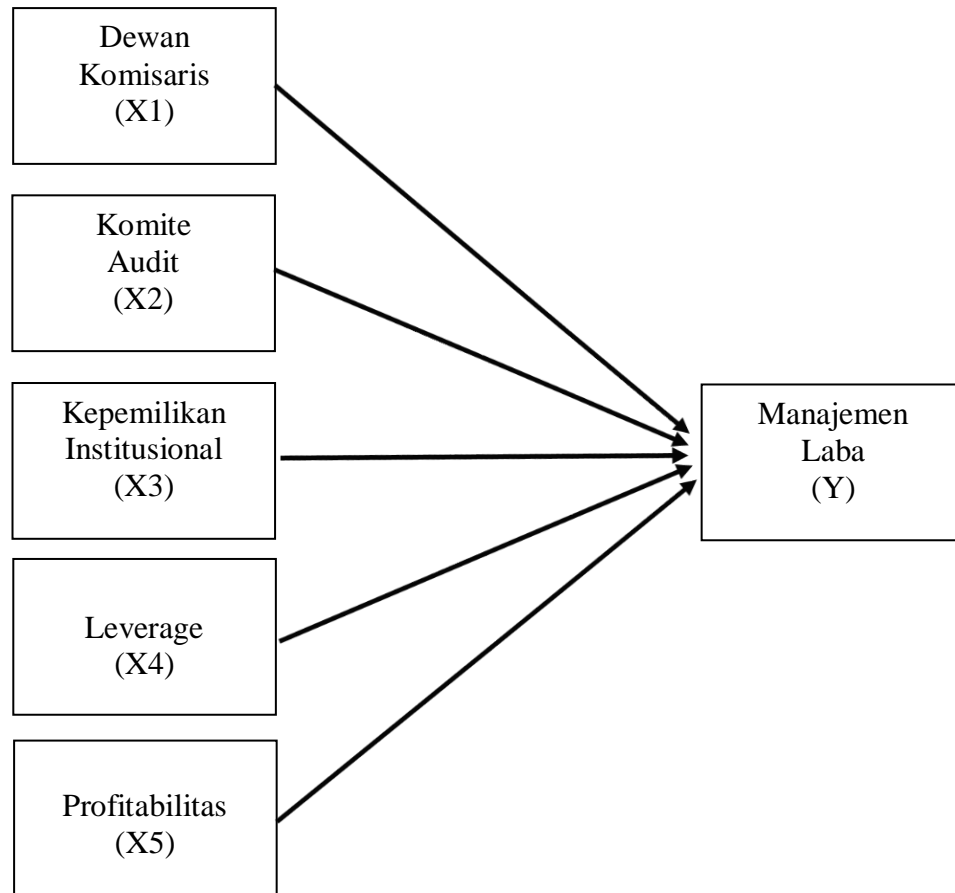
		<i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)	Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba / Analisis Regresi Linear Berganda	Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan
5.	Laila Nur Habibah (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Dalam Daftar <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) Tahun 2012-2017	Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba / Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
6.	Nur Mawaddah (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	<i>Good Corporate Governance</i> (Kepemilikan Publik), <i>Leverage</i> ,	Variabel <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh

		Pada Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2013- 2017	Manajemen Laba/ Analisis Regresi Linear Berganda	signifikan terhadap manajemen laba
7.	Benazir (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	Profitabilitas , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba / Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan Profitabilitas dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
8.	Silvia Ayu Ningsih (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Perencanaan Pajak, Manajemen Laba / Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

		Efek Indonesia Tahun 2013-2017)		
9.	Susi Winarti (2019)	Pengaruh Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba / Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
10.	Reni Ade Aprianti (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di ISSI Periode tahun 2017-2020)	Komite Audit, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Manajemen Laba Pada Perspektif Ekonomi Islam / Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba



### 2.3. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

### 2.4. Hipotesis Penelitian

#### 2.4.1. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba

##### 2.4.1.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris adalah wakil para pemegang saham dalam entitas bisnis yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki tugas melakukan pengawasan, memberikan nasihat atau arahan kepada dewan Direksi terkait perencanaan,

pengelolaan, serta pelaksanaan bisnis dan isu-isu perusahaan dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan (Dewi et al., 2018). Dengan adanya pengendalian internal, dewan komisaris dirasa memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dimana berdasarkan penelitian Hidayat (2017) dan Widita (2017) diperoleh hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H1 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

#### **2.4.1.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**

Menurut Hanggeraeni (2015:81) Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang diperlukan. Komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi dan memeriksa laporan keuangan, pengendalian internal, dan proses audit. Dengan adanya komite audit yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan, pengendalian internal dan audit dirasa memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan penelitian Khuriyati (2018) dan Habibah (2019) komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H2 : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba

### **2.4.1.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba**

Menurut Tarjo (2008) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Dengan jumlah kepemilikan institusional yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi tindakan manajer untuk melakukan manajemen laba demi kepentingan pihak tertentu. Hal tersebut dapat terjadi karena institusi pada umumnya akan memantau perusahaan yang diinvestasikan mengenai kinerja dan perkembangannya, dan hal inilah yang dapat menekan adanya manipulasi laba atau kecurangan lain yang dapat dilakukan oleh manajemen. Berdasarkan teori tersebut kepemilikan institusional dirasa memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, hal ini sesuai dengan penelitian Widita (2017) dan Aprianti (2021) dimana terdapat pengaruh signifikan dari kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

### **2.4.2. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba**

Hanafi (2005) menjelaskan bahwa *leverage* keuangan bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Sedangkan apabila menurut Sugiono dan Untung (2008) *leverage* adalah rasio perbandingan antar total utang dengan total aktiva dimana semakin besar hutang perusahaan dibandingkan dengan aktiva, maka semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan untuk membayar kewajibannya. Dengan kata lain, dengan adanya *leverage* dapat meningkatkan laba perusahaan jika digunakan dengan tepat, akan tetapi jika tidak sesuai yang

direncanakan maka dapat mengalami kerugian yang sama dengan persentase laba yang diharapkan, atau mungkin lebih besar (Van Horne, 2007). Selain itu dalam kasus tertentu manajemen laba dilakukan dengan tujuan menutupi kondisi *leverage* perusahaan sehingga hal ini dirasa berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya oleh Husna (2015), Mawaddah (2019) dan Ningsih (2019) dimana *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

H4 : Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba

#### **2.4.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba**

Harahap (2009) menjelaskan profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut profitabilitas berkaitan erat dengan laba perusahaan dimana hal ini dirasa berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya oleh Husna (2015), Ningsih (2019), dan Winarti (2019) ditemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

H5 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba